

PENELITIAN

JUDUL :

**ANALISIS KESESUAIAN PROGRAM BANTUAN
BAGI MASYARAKAT NELAYAN
DI WILAYAH PANTAI UTARA JAWA TENGAH
(Studi Pada Masyarakat Nelayan Morodemak)**



Disusun Oleh :

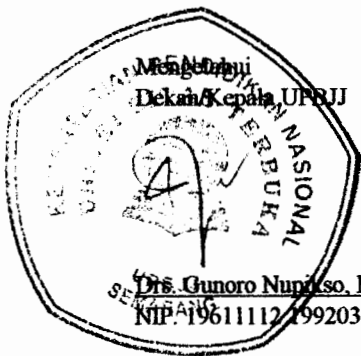
Drs. Gunoro Nupikso ,M.Si
Siswandarur Kurniawan ,SE. ,Akt. ,M.Si.
Eko Nugroho ,SE

**UNIVERSITAS TERBUKA
2010**

Lampiran 1

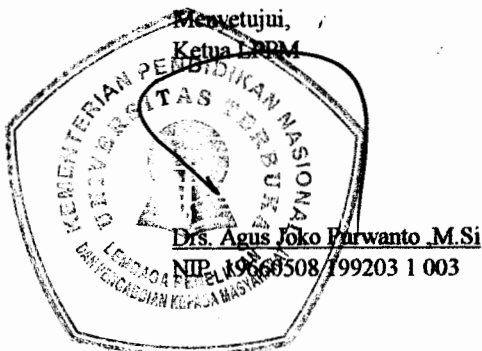
**LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN MADYA BIDANG ILMU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA**

1. a. Judul Penelitian : ANALISIS KESESUAIAN PROGRAM BANTUAN BAGI MASYARAKAT NELAYAN DI WILAYAH PANTAI UTARA JAWA TENGAH (Studi Pada Masyarakat Nelayan Morodemak)
- b. Bidang Penelitian : Keilmuan
- c. Klasifikasi Penelitian : Madya
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Gunoro Nupikso ,M.Si
b. NIP : 19611112 199203 1 001
c. Golongan Kepangkatan : Lektor
d. Jabatan Akademik Fakultas dan Unit Kerja : Dosen dan Kepala UPBJJ-UT Semarang
e. Program Studi : Manajemen
3. Anggota Peneliti
a. Jumlah Anggota : 2 Orang
b. Nama Anggota dan Unit Kerja :
 1. Siswандaru Kurniawan ,SE. ,Akt. ,M.Si. (UPBJJ-UT Semarang)
 2. Eko Nugroho ,SE
- c. Program Studi : Akuntansi dan IESP
4. a. Periode Penelitian : 2010
b. Lama Penelitian : 8 bulan
5. Biaya Penelitian : Rp 20.000.000,- (dipotong pajak)
6. Sumber Dana : LPPM UT 2010
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian :
 - a. Seminar
 - b. Jurnal
 - c. Pengabdian Masyarakat



Ketua Peneliti

Dr. Gunoro Nupikso, M.Si
NIP. 19611112 199203 1 001



Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed. M.Si
NIP. 19570422 198605 2 001

RINGKASAN

Kondisi kehidupan nelayan Indonesia sesungguhnya sangat ironis. Nelayan atau petani ikan miskin sebenarnya berada dalam lingkungan laut Indonesia yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya yang sangat potensial tetapi menjadi salah satu kantong terbesar masyarakat miskin. Kemiskinan yang mereka hadapi lebih banyak karena faktor sosial, ekonomi dan budaya, atau oleh Soedjatmoko disebut dengan **Kemiskinan Struktural**. Kehidupan nelayan menghadapi lingkaran setan kemiskinan akibat tingkat pendapatannya rendah karena disebabkan keterampilannya yang rendah dan skala usaha mereka kecil (Chazali H. Situmorang, 2009).

Kabupaten Demak berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah di samping itu dari sisi perhubungan darat berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa.

Kawasan nelayan Morodemak merupakan wilayah dari Pelabuhan Pendaratan Pantai (PPP) Morodemak yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Di kawasan Morodemak terdapat fasilitas pelabuhan yang didukung dengan keberadaan tempat pelelangan ikan (TPI) dan terdapat stasiun pengisian bahan bakar minyak nelayan (SPBN) meskipun keadaannya sekarang tidak dapat berfungsi karena ketiadaan pasokan akibat jembatan yang masih rusak.

PPP Morodemak secara administrasi terletak di desa Purworejo, akan tetapi masyarakat umum lebih mengenal sebagai kawasan nelayan Morodemak. Kawasan nelayan Morodemak terdiri dari sebagian besar para nelayan yang berada di beberapa desa yaitu: Desa Purworejo, Desa Margolinduk dan Desa Morodemak. Nelayan dari ketiga desa tersebut merupakan sebagian besar nelayan yang melakukan kegiatan harian di kawasan PPP Morodemak. Selain itu, kegiatan operasional di kawasan Morodemak juga didukung oleh sebagian kecil nelayan dari beberapa desa sekitar.

Desa Purworejo, Margolinduk dan Morodemak merupakan sentra penduduk dengan mata pencaharian nelayan di Kecamatan Bonang. Ketiga desa tersebut memiliki jumlah nelayan sekitar 40 persen dari penduduk yang bekerja di masing-masing desa.

Penelitian berjudul "*Analisis Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Pada Masyarakat Nelayan Morodemak)*" dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dilengkapi analisis kuantitatif sederhana.

Populasi obyek penelitian adalah nelayan di wilayah pantura Kabupaten Demak. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling melalui wawancara dengan key person untuk mendapatkan informasi yang terjadi di lapangan. Selain itu dilakukan observasi terhadap kondisi lapangan. Menurut Spradley tahapan observasi ada tiga (Sugiyono, 2009), yaitu: observasi diskriptif, observasi terfokus dan observasi terseleksi.

Upaya mengurangi jumlah kemiskinan di wilayah pesisir perlu dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan oleh semua *stakeholders* terkait. Pemerintah sebagai salah satu pihak terkait dalam pengembangan kawasan pesisir diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap pembangunan wilayah dan masyarakat pesisir khususnya nelayan. Untuk mendukung pembangunan kawasan pesisir maka pemerintah melakukannya melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut dapat berupa pemberian bantuan, perlindungan keamanan, penegakan aturan serta adanya bimbingan langsung secara teknis yang berkelanjutan.

Pemberian bantuan sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat nelayan diharapkan mampu memberikan efek yang langsung dirasakan masyarakat nelayan. Bantuan yang diberikan dapat diberikan secara langsung kepada masing-masing masyarakat yang membutuhkan terhadap perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Sedangkan bantuan tidak langsung diberikan dalam pembangunan sarana prasarana umum yang manfaatnya juga akan dirasakan secara bersama-sama secara lebih luas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kesesuaian bantuan bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Demak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan kawasan Morodemak sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan terhadap peralatan tangkap ikan. Dalam jangka pendek, pemberian bantuan peralatan tangkap telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil tangkapan nelayan yang menerima bantuan peralatan tersebut.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian bantuan adalah bahwa bantuan yang diberikan jumlahnya relatif terbatas dan hanya dapat diberikan kepada sebagian kecil nelayan. Manfaat terbesar dari pemberian bantuan hanya dapat dinikmati oleh nelayan penerima bantuan dan seringkali menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya kecemburuan sosial dari nelayan lain yang tidak menerima.
3. Program pemberian bantuan bagi masyarakat nelayan masih sering dipahami sebagai kegiatan rutin tahunan sehingga pola pembinaan sebagai tindak lanjut program seringkali diabaikan dengan alasan klasik ketiadaan anggaran. Ketiadaan pola pembinaan yang berkesinambungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat nelayan bahwa bantuan yang diberikan dapat dikembangkan agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat.

Dan sebagai saran yang diajukan dalam penelitian ini kepada pemerintah antara lain adalah adanya kemudahan dan keterjangkauan terhadap bahan bakar minyak (BBM) karena merupakan input terbesar dalam biaya operasional nelayan, diperlukan suatu pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi nelayan kecil dari persaingan yang tidak sehat, bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan di wilayah pesisir di masa mendatang tidak hanya diarahkan ke sektor perikanan tangkap tetapi juga diperlukan bantuan lainnya untuk mendukung program pengembangan diversifikasi usaha nelayan dalam rangka peningkatan tambahan sumber penghasilan masyarakat nelayan, pola pembinaan masyarakat nelayan perlu dilakukan secara terus menerus dan melibatkan berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemerintah dapat kembali mengaktifkan keberadaan petugas penyuluh lapangan (PPL) sebagai ujung tombak pembangunan perikanan yang bertugas melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan secara berkesinambungan kepada masyarakat nelayan di kawasan pesisir.

PRAKATA

Di era globalisasi yang bercirikan liberalisasi perdagangan dan persaingan antarbangsa yang semakin sengit, maka seluruh kegiatan ekonomi yang direvitalisasi harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi. Permasalahan krusial yang kini dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Salah satunya adalah kondisi kehidupan nelayan Indonesia sesungguhnya sangat ironis. Nelayan atau petani ikan miskin sebenarnya berada dalam lingkungan laut Indonesia yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya yang sangat potensial tetapi menjadi salah satu kantong terbesar masyarakat miskin. Kemiskinan yang mereka hadapi lebih banyak karena faktor sosial, ekonomi dan budaya, atau oleh **Soedjatmoko** disebut dengan **Kemiskinan Struktural**.

Oleh karenanya Tim Peneliti mencoba untuk menganalisis bantuan-bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada para nelayan yang ada di pesisir pantai, sehingga diharapkan para nelayan tersebut memiliki kemampuan yang lebih dan berdaya guna tinggi, dan kemungkinan bantuan apa saja yang bisa diberikan oleh pemerintah yang pada saat ini belum dilakukan ataupun pernah dilakukan namun saat ini sudah tidak diberikan lagi akan tetapi memiliki kemungkinan lebih untuk di lakukan lagi.

Dalam penelitian ini Peneliti mengambil salah satu sample masyarakat nelayan, yaitu Kawasan nelayan Morodemak yang merupakan wilayah dari Pelabuhan Pendaratan Pantai (PPP) Morodemak yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Adapun alasan peneliti mengambil sample tersebut karena wilayah Kabupaten Demak berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah di samping itu dari sisi perhubungan darat berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa.

Harapan kami dari Tim Peneliti adalah adanya manfaat yang besar dari penelitian kami ini bagi semua pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung, serta menambah informasi keilmuan bagi ilmu pengetahuan. Dan tak lupa terima kasih atas kerjasama dari semua pihak, semoga Allah SWT membalas dengan setimpal. Amin.

Semarang, 8 Desember 2010

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
Ringkasan	
Abstrak	
Prakata	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
1.5 Hasil yang Diharapkan	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Kemiskinan Masyarakat Nelayan	7
2.2 Struktur Sosial Masyarakat Nelayan	14
2.3 Keputusan dan Strategi Hidup Masyarakat Nelayan Miskin	15
2.4 Kebijakan Perikanan	16
2.5 Kerangka Pikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Metode Pelaksanaan	21
3.2 Pendekatan Penelitian	21
3.3 Lokasi	21
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	22
3.5 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	22
3.6 Gambaran Umum dan Obyek Penelitian	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Karakteristik Responden	32
4.2 Bantuan bagi Masyarakat Nelayan	37
4.3 Efektifitas dan Kesesuaian Bantuan	39
4.4 Permasalahan dalam Pemberian Bantuan	42
4.5 Pola Pembinaan Setelah Pemberian Bantuan	45
BAB V PENUTUP	48
5.1. Simpulan	48
5.2. Saran	49
Daftar Pustaka	50
Ucapan Terima Kasih	52
Lampiran 1	53

DAFTAR TABEL

<u>No.</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 3.1	Jumlah Kapal Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Wilayah Pelabuhan Pantai Utara Jawa Tengah	25
Tabel 3.2	Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Di Wilayah PPP Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	30
Tabel 3.3	Penduduk 10 Tahun keatas Berdasarkan Pendidikan Di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	30
Tabel 4.1	Profil Umur Responden	32
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Responden	33
Tabel 4.3	Status Kepemilikan Kapal	33
Tabel 4.4	Jumlah Keluarga Responden	34
Tabel 4.5	Jenis Kapal Responden	35
Tabel 4.6	Kegiatan Responden di Darat	36
Tabel 4.7	Bantuan Bagi Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Demak Periode Tahun 2003 - 2010	38

DAFTAR GAMBAR

<u>No.</u>	<u>Keterangan</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 3.1	Peta Kecamatan Bonang	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi sebuah masalah nyata di sekitar kehidupan yang seakan tidak ada habisnya untuk dibahas dalam berbagai generasi. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya krisis moneter dan ekonomi yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia secara cukup drastis. Sekitar 52% rakyat Indonesia dapat dikategorikan berada di bawah garis kemiskinan bila diukur dari standar Bank Dunia yang melihat batas garis kemiskinan adalah \$2 per kepala per hari (Isbandi Rukminto Adi, 2005).

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh berbagai permasalahan seperti antara lain rendahnya kualitas hidup rata-rata penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan air minum. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Penduduk miskin adalah yang paling rendah kemampuannya. Pada saat ini mereka terpusat di kantong kemiskinan, seperti di desa pantai dan kepulauan atau daerah pasang surut (Chazali H. Situmorang, 2009).

Sebagai salah satu kantong kemiskinan, kondisi kemiskinan sudah seperti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kalangan masyarakat nelayan. Akan tetapi, kalau dicermati lebih jauh kultur masyarakat nelayan memiliki etos kerja yang handal karena mereka biasanya pergi subuh pulang siang, kemudian menyempatkan waktunya

pada waktu senggang untuk memperbaiki jaring. Kemiskinan nelayan ditengarai oleh ketiadaan modal dan rendahnya kultur kewirausahaan.

Kondisi kehidupan nelayan Indonesia sesungguhnya sangat ironis. Nelayan atau petani ikan miskin sebenarnya berada dalam lingkungan laut Indonesia yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumber daya yang sangat potensial tetapi menjadi salah satu kantong terbesar masyarakat miskin. Kemiskinan yang mereka hadapi lebih banyak karena faktor sosial, ekonomi dan budaya, atau oleh **Soedjatmoko** disebut dengan **Kemiskinan Struktural**. Kehidupan nelayan menghadapi lingkaran setan kemiskinan akibat tingkat pendapatannya rendah karena disebabkan keterampilannya yang rendah dan skala usaha mereka kecil (Chazali H. Situmorang, 2009).

Situasi dan kondisi kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan ini disebabkan beberapa hal (www.pppmnmedan.wordpress.com):

- a. Nelayan dikebanyakan wilayah pesisir di Indonesia umumnya merupakan kelompok yang sangat sulit untuk diorganisasikan.
- b. Nelayan juga umumnya merupakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki alur-kas sehingga konsep perencanaan ekonominya sangat tidak pasti. Oleh karena itu, kelompok Nelayan lebih banyak bergerak dalam kesatuan-kesatuan informal tanpa memiliki perencanaan ekonomi yang jangka panjang.
- c. Kondisi nelayan juga belum banyak tersentuh dengan program-program yang benar-benar dapat mengembangkan ekonomi mereka secara riil, terorganisasi dan berkelanjutan.
- d. Belum banyak instansi lokal yang secara riil fisik membantu peningkatan ekonomi nelayan, walaupun telah banyak peran mereka dalam membantu di bidang non-fisik di banyak kelompok nelayan.

Kehidupan masyarakat nelayan umumnya tidak memiliki usaha lain di luar penangkapan ataupun pengolahan ikan. Nelayan banyak menganggur di saat musim paceklik ikan akibat cuaca yang tidak bersahabat. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab produktivitas nelayan yang dapat dikatakan sangat rendah karena nelayan tidak dapat melaut sepanjang tahun.

Kegiatan usaha pengolahan ikan yang bergantung dari hasil tangkapan ikan banyak yang hanya mampu bertahan hidup hidup saja. Permasalahan mengenai aspek produksi, pemasaran, permodalan dan keuangan serta manajemen yang bersifat tradisional masih menjadi kendala pengembangan usaha nelayan (Riffin, 1997). Padahal, peran usaha/industri kecil sebenarnya sangat berarti bagi perkembangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Kelemahan masyarakat nelayan semakin bertambah karena kondisi informasi yang terbatas dan mekanisme pasar yang kurang menguntungkan. Masyarakat nelayan umumnya membeli bahan bakar, peralatan dan perbekalan sesuai dengan harga pasar, akan tetapi mereka terpaksa menjual hasil tangkapan dan produksi pengolahan dengan harga sesuai yang ditetapkan oleh tengkulak yang menguasai pasar ikan.

Kegiatan operasional nelayan sangat dipengaruhi oleh harga dan tersedianya bahan bakar (BBM) sebagai faktor utama operasional kegiatan penangkapan. Biaya BBM mencakup sekitar 60 – 70 persen dari total biaya untuk operasional.

Kondisi kemiskinan masyarakat nelayan diperparah dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Naiknya BBM jelas merupakan momok bagi nelayan karena akan mengurangi kemampuan nelayan dalam melaut karena tingginya ketergantungan mereka terutama pada jenis solar. Strategi nelayan untuk bisa bertahan dalam melakukan penangkapan ikan dilakukan dengan cara mengoplos atau mencampur

solar dengan minyak tanah (kerosin), bahkan ada yang seratus persen kerosin. Tindakan pengoplosan terpaksa dilakukan karena tingginya harga BBM jenis solar dibandingkan dengan harga minyak tanah yang masih disubsidi oleh pemerintah.

Usaha pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Program pemerintah dalam memberikan bantuan bagi masyarakat nelayan dilaksanakan melalui berbagai program yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat nelayan.

Di lain pihak, sebagai kompensasi kenaikan BBM, Pemerintah juga telah mengadakan program khusus melalui Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dimulai pada tahun 2000 lalu. Selain itu, juga diberikan Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang dimulai sejak bulan Oktober 2005 sebagai upaya mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak kenaikan BBM terus dilanjutkan hingga September 2006.

Sementara itu, produksi perikanan laut di Jawa Tengah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 jumlah produksi perikanan laut masih sebesar 281.267 ton dengan nilai Rp.1.122.530.172.000,-, pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi sebesar 236.235 ton, dan pada tahun 2004 mengalami sedikit kenaikan menjadi sebesar 244.289,3 ton. Akan tetapi, pada tahun 2005 dan 2006 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 190.935,3 ton dan 181.533,2 ton, dengan nilai raman Rp. 780.525.818.800,- dan Rp. 774.094.647.000,-.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, misalnya berbagai program telah dilakukan pemerintah. Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil dan Nelayan (P4K),

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Namun banyak pengamat yang menyatakan bahwa program-program ini di hampir semua daerah mengalami kegagalan. Kalaupun ada yang berhasil itu hanya di atas kertas semata, yaitu dalam laporan akhir proyek.

Untuk dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, perlu pengamatan dan penelitian yang mendalam. Hal ini dimaksudkan agar mampu mengenali lebih dekat dinamika ekonomi keseharian masyarakat nelayan. Dengan demikian, pemahaman yang akurat terhadap kemiskinan masyarakat nelayan dapat membuahkan kebijakan pro-rakyat miskin yang terarah, sistemik dan efektif. Tukar pikiran dan metode, perlu dilakukan guna menemukan strategi paling tepat.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkaji kesesuaian program bantuan yang sudah direalisasikan dengan kebutuhan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Pantura Jawa Tengah, sehingga dapat diperoleh masukan dan rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya di Jawa Tengah.

1.2. Permasalahan

Program bantuan bagi nelayan yang sudah dilakukan dianggap belum banyak mengubah kehidupan kemiskinan di lingkungan masyarakat nelayan. Diperlukan analisis tentang kebutuhan bantuan yang sebenarnya diperlukan dan kesesuaian bantuan yang telah diberikan. Oleh karena itu diperlukan analisis tentang:

1. Bantuan apa yang sesuai dengan kebutuhan nelayan wilayah pantura Jawa?
2. Apakah ada permasalahan terhadap bantuan yang selama ini sudah diberikan?
3. Bagaimana pola pembinaan pasca program bantuan bagi masyarakat nelayan?

1.3 Tujuan

1. Mengevaluasi efektifitas dan kesesuaian program bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap kebutuhan nelayan wilayah pantura Jawa.
2. Mendapatkan informasi yang akurat tentang permasalahan terhadap bantuan yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah.
3. Dapat memberikan pola pembinaan yang tepat pasca program bantuan bagi masyarakat nelayan.

1.4 Manfaat

Rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun program bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan, khususnya bagi nelayan di Kabupaten Demak, dan nelayan wilayah perairan Pantai Utara Jawa Tengah pada umumnya. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi dunia ilmu pengetahuan yang membutuhkan, terutama Universitas Terbuka.

1.5 Hasil yang Diharapkan

1. Informasi efektifitas dan kesesuaian program bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah.
2. Teridentifikasinya program aksi yang sesuai dengan kebutuhan nelayan di wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kemiskinan Masyarakat Nelayan

Menurut Nikijuluw (2000), beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan masyarakat pesisir adalah sebagai akibat dari :

1. Akses sumber daya bersifat terbuka (*open access recourses*)

Oleh karena akses bersifat terbuka, maka siapa saja (perorangan, kelompok, atau badan hukum) bebas melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Oleh karenanya terjadi persaingan antara berbagai skala usaha, mengakibatkan nelayan kecil menjadi terpinggirkan sehingga hasil tangkapan dan penghasilannya minimal.

2. Menjadi wilayah yang paling tertekan.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling tertekan, yang berasal dari 3 (tiga) arah, yaitu : pertama, dari dalam wilayah pesisir sendiri yang memiliki tingkat eksploitasi yang tinggi, kedua, menerima beban akibat kegiatan dan eksploitasi dari darat maupun dan yang ketiga, tekanan langsung dari lautan. Kondisi tersebut mengakibatkan degradasi sumberdaya alam di wilayah ini berjalan sangat cepat.

3. Merupakan wilayah yang kurang mendapat perhatian

Wilayah pesisir masih merupakan wilayah yang kurang mendapat perhatian, sehingga kumuh, miskin sarana prasarana perekonomian dan rendahnya mutu lingkungan.

4. Merupakan wilayah yang mudah dan banyak diakses

Kemudahan akses tersebut baik dari arah laut maupun dari darat, sehingga pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pesisir saja.

5. Merupakan wilayah yang mudah berubah secara biofisik

Akibat pengaruh faktor-faktor dari lautan seperti abrasi serta pencemaran dan sedimentasi dari darat, mengakibatkan mudahnya terjadi degradasi sumberdaya alam di wilayah pesisir.

6. Merupakan wilayah yang banyak penduduknya tetapi kualitasnya rendah

Oleh karena mudah diakses maka pada wilayah pesisir menjadi daerah urbah, dengan kepadatan yang tinggi. Mereka umumnya memiliki pencaharian yang tergantung pada sumberdaya pesisir yang terbatas. Akibatnya tidak mampu meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM. Perpindahan tenaga kerja dari wilayah pedesaan yang pertanian ke wilayah pesisir menjadi nelayan ditengarai semakin meningkat, oleh karena terbatasnya lahan pertanian di pedesaan.

Adiwibowo (2000) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat nelayan adalah sebagai berikut.

- a. Keterbatasan kepemilikan faktor-faktor produksi (armada tangkap).
- b. Pola hubungan ekonomi antar lapisan sosial (juragan-pandega)
- c. Kebijakan pemerintah yang disadari atau tidak, bias pada pemodal kuat.
- d. Kekuatan penegakan hukum yang lemah terhadap pencurian sumberdaya oleh kapal asing dan perusakan habitat oleh masyarakat lokal.
- e. Pada perairan pesisir yang padat penduduk telah terjadi tangkap lebih (*overfishing*), baik secara biologi, ekonomi maupun sosial.

f. Tingginya faktor ketidakpastian akan hasil tangkapan.

Berdasarkan karakter masyarakat pesisir yang demikian, maka akan mempengaruhi keputusan dan strategi eksploitasi sumberdaya pesisir dan laut. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat nelayan memberikan respon yang positif terhadap upaya pembaharuan teknologi pemanfaatan sumberdaya maupun upaya pengelolaan sumberdaya apabila :

1. Manfaat dapat segera dirasakan/dipetik dalam waktu singkat,
2. Manfaat dirasakan oleh masyarakat sekitar,
3. Manfaat jelas dan terukur,
4. Manfaat diterima oleh yang mengeluarkan biaya

Masih menurut Adi Wibowo (2000) pada akhir-akhir ini kemiskinan masyarakat pesisir cenderung meningkat dan semakin kompleks, antara lain disebabkan oleh:

a. Semakin berkurangnya akses nelayan terhadap sumber daya alam

Pada saat musim sepi ikan, banyak nelayan melakukan *amen* (mencari ikan ke wilayah lain), tetapi sering terjadi kecemburuan dan pengusiran dari nelayan lokal. Selain itu faktor yang lain adalah mobilitas usia tenaga kerja baru untuk keluar dari desa hampir tidak ada, pilihan mereka tetap melaut. Bertambahnya nelayan dan jumlah perahu, berdampak pada penurunan stok ikan.

b. Menurunnya hasil tangkapan nelayan

Semakin banyaknya jumlah kapal yang mencari ikan, sehingga berdampak pada hasil tangkapan semakin menurun. Selain faktor kapal semakin banyak, juga dipengaruhi degradasi habitat. Kecenderungan 10 tahun terakhir ini merasakan perubahan yang luar biasa dari stok ikan yang semakin sedikit.

c. Menurunnya harga jual ikan

Faktor harga hasil tangkapan sangat memengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan. Kecenderungan yang terjadi fluktuasi harga ikan tidak pernah menentu, khususnya dalam 10 tahun ini. Sebelum tahun 1996 harga ikan masih cenderung stabil dan tahun 1997-1999 mengalami kenaikan harga yang luar biasa karena pengaruh krisis moneter dan permintaan luar negeri banyak. Merosotnya harga ikan saat ini lebih banyak disebabkan oleh permainan bakul karena penentuan harga ikan berada penuh di tangan bakul. Selain itu, minimnya informasi yang didapat nelayan berkaitan dengan harga hampir tidak ada sama sekali, disisi lain tidak adanya kebijakan perlindungan harga semakin memperpuruk nasib nelayan.

d. Semakin Tingginya Konflik Antar Nelayan

Dampak dari berkurangnya akses nelayan terhadap sumber daya laut di wilayahnya, banyak nelayan 10 tahun ini memilih mencari ikan ke daerah lain (*Amen*). Hal ini dilakukan karena faktor minimnya penghasilan pada saat-saat tidak musim ikan dan jumlah populasi ikan didaerahnya sudah tidak bisa menghasilkan. Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini adalah terjadi penolakan dan pengusiran oleh nelayan lokal masuk ke daerahnya. Berbagai alasan yang dipakai nelayan lokal untuk melakukan pengusiran diantaranya adalah masalah perempuan dan masalah otonomi daerah. Karena terjadi penolakan tersebut, nelayan lebih banyak mencari ikan didaerahnya sendiri. Dengan sedikitnya ikan yang ada, mau tidak mau pilihan jaring yang dipakai adalah jaring yang tidak ramah lingkungan, seperti *petek/cotok*.

e. Meningkatkan Biaya Operasional Kapal

Dicabutnya subsidi BBM khususnya solar dan minyak tanah sangat memukul nelayan. Dampak yang paling nyata adalah tidak imbangnya biaya operasional mesin dalam hal ini solar dengan hasil tangkapan. Sebagai pengganti solar untuk menjalankan mesin kapal, sekarang ini masyarakat mengganti dengan *IREX*, yaitu campuran minyak tanah dengan oli bekas (Perbandingan 10:1). Upaya yang dilakukan mampu menekan biaya operasional, namun biaya operasionalnya masih tetap dianggap tinggi. Hal ini sangat terkait juga dengan menurunnya populasi ikan serta dampak pemakaian *IREX* terhadap mesin kapal akan menyebabkan noksel mudah sekali terbakar.

Selain itu Adi Wibowo juga mengemukakan bahwa kemiskinan yang terjadi pada masyarakat nelayan paling tidak dicirikan oleh lima karakteristik, yaitu:

- a. Pendapatan nelayan bersifat harian (*daily increments*) dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu, pendapatannya juga sangat tergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri, dalam arti ia sebagai juragan atau pandega. Dengan pendapatan yang bersifat harian, tidak dapat ditentukan dan sangat tergantung pada musim, maka mereka (khususnya nelayan pandega) sangat sulit dalam merencanakan penggunaan pendapatannya. Keadaan demikian mendorong nelayan untuk membelanjakan uangnya segera setelah mendapatkan penghasilan. Implikasinya, nelayan sulit untuk mengakumulasi modal atau menabung. Pendapatan yang mereka peroleh pada musim penangkapan ikan habis digunakan untuk menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari, bahkan sering tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Masa penangkapan ikan yang hanya semusim dalam satu tahun, menyebabkan pendapatan nelayan sangat kecil. Pada

musim paceklik (musim angin barat), mereka seringkali harus berhutang, khususnya kepada juragan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya.

- b. Tingkat pendidikan nelayan maupun anak-anak nelayan pada umumnya rendah. Kondisi demikian mempersulit mereka dalam memilih alternatif pekerjaan lain, selain meneruskan pekerjaan orangtuanya sebagai nelayan. Sementara itu, anak-anak nelayan yang berhasil mencapai pendidikan tinggi, maupun para sarjana perikanan, enggan untuk berprofesi sebagai nelayan karena menganggap profesi nelayan sebagai lambang ketidakmapanan.
- c. Dihubungkan dengan sifat produk yang dihasilkan nelayan, maka nelayan lebih banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar karena produk tersebut bukan merupakan makanan pokok. Selain itu, sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan, menimbulkan ketergantungan yang besar nelayan pada pedagang. Ini menyebabkan harga ikan dari nelayan dikuasai oleh pedagang.
- d. Bidang perikanan membutuhkan investasi cukup besar dan cenderung mengandung risiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Oleh karena itu, nelayan cenderung menggunakan armada dan peralatan tangkap sederhana, ataupun hanya menjadi anak buah kapal (ABK). Dalam hubungannya dengan pemilik kapal, nelayan terlibat dalam suatu pembagian hasil yang seringkali tidak menguntungkan mereka. ABK yang bekerja keras di laut dengan penuh risiko, hanya mendapat bagian yang sangat kecil, sedangkan pemilik kapal yang tinggal di darat mendapat bagian yang jauh lebih besar. Hasil yang diperoleh sekali melaut, 50 persen untuk juragan, sedangkan sisanya setelah dikurangi

biaya operasional dibagi pada ABK sesuai dengan kedudukan atau statusnya.

Dalam sistem bagi hasil ini, nelayan pandega mendapat bagian paling sedikit.

- e. Kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, misalnya ditunjukkan oleh terbatasnya anggota keluarga yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada satu mata pencaharian, yaitu menangkap ikan. Keluarga nelayan memiliki kebiasaan tidak mengikutkan perempuan dan anak-anak dalam penangkapan ikan. Demikian pula dalam kegiatan pemasaran maupun pengolahannya karena umumnya hasil laut tersebut langsung dijual kepada pedagang tanpa melalui pengolahan. Kondisi wilayah pesisir yang umumnya gersang juga mengurangi kesempatan mereka untuk membuka lapangan kerja dan mengembangkan usaha di sektor lain.

Perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan masyarakat nelayan dapat diibaratkan pasien yang mengalami komplikasi penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait satu sama lainnya. Selain kelima kondisi internal seperti tersebut di atas, kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti makin terbatasnya potensi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang semakin intensif, irama musim, mekanisme pasar, keadaan infrastruktur pelabuhan, dan kebijakan pengentasan kemiskinan nelayan yang kurang tepat.

Oleh karena itu, kegiatan apapun, *apakah peraturan daerah (perda) untuk mengatasi konflik nelayan dan pengembangan lembaga keuangan mikro, peningkatan produktivitas atau diversifikasi usaha, atau manajemen perikanan berkelanjutan*, tidak akan mencapai hasil maksimal, atau bahkan gagal meningkatkan kesejahteraan

masyarakat nelayan, jika dilaksanakan secara parsial, sektoral, *top down*, proyek, insidental, dan tidak berkelanjutan.

2.2. Struktur Sosial Masyarakat Nelayan

Menurut Adi Wibowo (2000) berdasarkan status sosialnya, masyarakat nelayan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Juragan.

Juragan termasuk kelompok nelayan kaya, yang memiliki kapal dan memperkerjakan nelayan lain sebagai pendega tanpa yang bersangkutan ikut bekerja di laut.

2. Nelayan kaya.

Termasuk kelompok ini adalah mereka yang memiliki kapal yang lebih kecil (perahu), tetapi yang bersangkutan masih ikut bekerja di laut sebagai awak kapal.

3. Nelayan sedang/menengah.

Nelayan kelompok ini memiliki perahu yang dalam bekerjanya tanpa memperkerjakan orang lain. Sebagai anak buah kapal (ABK) adalah anggota keluarganya sendiri.

4. Nelayan miskin.

Nelayan ini bisa jadi memiliki perahu, tetapi hasil tangkapannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Seringkali mereka harus melakukan usaha sambilan untuk menutupi kebutuhan hidupnya.

5. Nelayan pendega.

Nelayan miskin tidak memiliki sarana produksi, seperti perahu atau alat tangkap, dan mereka hanya sebagai pekerja atau pendega.

2.3. Keputusan dan Strategi Hidup Masyarakat Nelayan Miskin

Keputusan dan strategi hidup nelayan miskin dalam upaya untuk tetap *survive* dapat dipisahkan menjadi strategi internal dan eksternal rumah tangga.

1. Strategi internal rumah tangga

- a. Melibatkan tenaga kerja keluarga untuk mencari nafkah
- b. Bekerja keras untuk menambah pendapatan
- c. Mencari pekerjaan sambilan atau nafkah ganda

2. Strategi eksternal

- a. Penguasaan dan konversi kawasan konservasi menjadi lahan produksi (tambak/pertanian).
- b. Menggunakan alat produksi yang murah, mudah dan produktif tanpa mempertimbangkan keberlanjutan usaha, seperti menggunakan bahan peledak, racun, alat tangkap jaring dengan mata jaring yang sangat kecil, dan sebagainya.
- c. Migrasi ke wilayah lain, sebagai upaya terakhir jika sudah tidak mampu bertahan.

Oleh karena persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan miskin tersebut, menurut Adiwibowo (2000), upaya yang dilakukan masyarakat nelayan untuk bertahan hidup adalah mendorong timbulnya prinsip *safety first*. Implikasi dari prinsip tersebut adalah bahwa bagi nelayan yang terpenting meminimalkan ancaman, atau bahaya, atau resiko daripada memaksimalkan perolehan/pendapatan.

Perwujudan prinsip tersebut di lapang dapat terlihat berkembangnya atau digunakannya sistem bagi hasil, terbentuknya *patron-client* antara juragan sebagai pemilik modal dan nelayan miskin (pandega). Walaupun pada kedua sistem tersebut nelayan miskin seringkali berada pada pihak yang dirugikan, namun mereka merasa

nyaman melaksanakannya. Hal ini antara lain disebabkan bahwa sistem *patron-client* tidak hanya berjalan dalam cakupan usaha saja, tetapi seringkali dalam kerangka yang lebih luas, yang mencakup kehidupan sosial budaya keluarga. Seorang juragan seringkali tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga menyediakan bantuan bagi rumah tangga nelayan miskin dalam mengatasi masalah keluarga.

2.4. Kebijakan Perikanan

A. Kebijakan Perikanan Budidaya

Kebijakan pembangunan perikanan budidaya diarahkan untuk pengembangan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, devisa negara, menyediakan protein hewani yang berasal dari ikan hasil budidaya bagi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan ikan dalam negeri. Agar kebijakan pembangunan perikanan budidaya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan diharapkan maka strategi yang ditempuh adalah (www.diskanlutprovjateng.go.id):

a. Pengembangan sistem usaha dan kawasan budidaya

Kawasan budidaya laut, payau dan air tawar sesuai daya dukung lahan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup guna mewujudkan sistem usaha budidaya yang berdaya saing berkelanjutan dan berkeadilan.

b. Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan

Dilakukan melalui penguatan modal kelompok, inovasi teknologi dan dukungan pemasaran, pembinaan kemitraan usaha, pemberian akses kepada lembaga keuangan serta pengembangan jaringan antar kelompok pembudidaya sejenis

c. Penciptaan iklim usaha yang konduktif

Melalui regulasi dan diregulasi yang ditunjang dengan pembangunan.

B. Kebijakan Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di wilayah laut Jawa berupa ikan demersal, udang, pelagis kecil dan pelagis besar. Ikan demersal terdiri dari jenis ikan antara lain ikan kakap merah, bawal, kerapu, manyung, peperek. Udang termasuk ikan demersal. Ikan pelagis kecil terdiri dari jenis ikan antara lain ikan layang, ikan kembung, ikan selar, sardin. Ikan pelagis besar terdiri dari jenis ikan antara lain ikan tongkol, ikan tuna, cakalang. Kondisi sumber daya ikan di laut Jawa sudah *full exploited* untuk ikan demersal dan udang, sementara ikan pelagis kecil kondisinya sudah *over exploited* dan ikan pelagis besar kondisinya *uncertain* (www.brkp.dkp.go.id).

Kegiatan usaha penangkapan terhadap jenis-jenis sumberdaya perikanan tersebut dapat dikemukakan lebih lanjut sbb (www.bi.go.id/sipuk) :

1. Udang laut yang termasuk sumberdaya demersal ditangkap dengan alat penangkap pukat udang, jatilap (jaring trammel) jaring insang dasar serta dogo/cantang
2. Ikan tuna cakalang dan cucut ditangkap dengan alat tangkap dengan alat penangkap seperti rawai tuna, rawai tegak lurus, pancing tonda, huhate, pukat cincin ukuran besar, jaring insang, serta rawai cucut.
3. Ikan pelagis kecil misalnya lemuru, tembang, japuh, kembung dll. Diusahakan alat penangkap seperti pukat cincin, payang, bagan, pukat tepi, jaring insang, jaring lingkaran dan pakaya.

4. Untuk Ikan demersal lainnya yaitu Petek, kakap, kerapu, ikan sebelah dll. Dapat ditangkap dengan dogol, jogol, cantrang, jaring insang dasar, rawai dasar bubu dasar, pukot tepi, serta pancing tangan (hand line)

Program/kegiatan pembangunan perikanan tangkap Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sumber daya Ikan yang Bertanggung Jawab
2. Pengembangan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
3. Pengembangan Pelabuhan, PPI dan TPI Perikanan
4. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
5. Penanganan Mutu Bahan Baku Perikanan
6. Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Penangkapan
7. Peningkatan Kesadaran Keselamatan Usaha Penangkapan Ikan

Berpijak pada kondisi perikanan tangkap Jawa Tengah kebijakan strategis yang akan ditempuh diarahkan kepada:

1. Perikanan tangkap sebagai salah satu andalan perekonomian masyarakat Jawa Tengah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota,
2. Modernisasi armada perikanan tangkap terutama pada daerah Pantai Utara Jawa Tengah serta peningkatan armada padadaerah pantai selatan Jawa Tengah,
3. Penerapan pengelolaan perikanan (*fisheriesmanagement*) secara bertahap berorientasi kepada pelestarian lingkungan dan terwujudnya keadilan,
4. Revitalisasi usaha penangkapan ikan.

2.5. Kerangka Pikir

Sumberdaya ikan di laut, sebagai sumber utama buruan nelayan, bukanlah tidak terbatas, meskipun merupakan sumberdaya yang dapat pulih secara alami. Perairan Laut Jawa sebelah Utara Jawa Tengah pada dasarnya memiliki potensi sumberdaya ikan, yang dapat dimanfaatkan untuk sumber pencaharian dan penghidupan nelayan PANTURA. Panjang Pantura Jawa Tengah sekitar 502 km, didukung oleh banyaknya muara sungai, menggambarkan bahwa Perairan Pantura Jawa Tengah memiliki potensi sumberdaya ikan yang besar. Namun pada kenyataannya potensi sumberdaya ikan yang terkandung di dalamnya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan yang memanfaatkannya.

Jumlah nelayan yang terus bertambah seiring dengan semakin sempitnya lahan pertanian di darat, yang berakibat pada semakin bertambahnya jumlah armada penangkapan ikan, sehingga eksploitasi terhadap sumberdaya ikan semakin meningkat. Pada saat yang sama, jumlah penduduk Jawa Tengah yang terus bertambah, yang diringi dengan berkembangnya pemanfaatan dan eksploitasi lahan daratan, termasuk industri, yang tidak berjalan seiring dengan kesadaran pelestarian lingkungan, berakibat pada menurunnya daya dukung lingkungan bagi pembentukan stok sumberdaya ikan alami.

Implikasi dari hal tersebut di atas, produksi ikan dari waktu ke waktu cenderung terus menurun, sehingga produktivitas per unit armada penangkapan juga menurun. Implikasi lebih lanjut adalah menurunnya pendapatan nelayan. Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya biaya penangkapan akibat naiknya harga BBM.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh nelayan antara lain dengan memodifikasi alat tangkap, yakni dengan menggunakan alat tangkap yang

memiliki ukuran mata jaring kecil. Strategi ini dalam jangka panjang akan semakin memperburuk perekonomian nelayan, karena kelestarian sumberdaya ikan menjadi tidak terjaga. Di sisi lain, Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan berbagai program kegiatan, seperti P4K, JPS, PEMP, PNPM Mandiri dan berbagai jenis bantuan yang bersifat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat nelayan. Namun sejauh ini belum mampu mengentaskan nelayan dari kemiskinan. Berdasarkan atas pemikiran tersebut maka kajian tentang penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan perlu dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Populasi obyek penelitian adalah nelayan di wilayah pantura Kabupaten Demak. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling melalui wawancara dengan key person untuk mendapatkan informasi yang terjadi di lapangan. Selain itu dilakukan observasi terhadap kondisi lapangan. Menurut Spradley tahapan observasi ada tiga (Sugiyono, 2009), yaitu: observasi diskriptif, observasi terfokus dan observasi terseleksi.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ” Analisis Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Pada Masyarakat Nelayan Morodemak)” dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dilengkapi analisis kuantitatif sederhana.

3.3. Lokasi

Lokasi penelitian ini meliputi adalah masyarakat nelayan di kawasan masyarakat nelayan di wilayah Morodemak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah masyarakat nelayan di wilayah pesisir pantura Morodemak. Sampel penelitian diambil secara *purposive random sampling* di wilayah Morodemak Kabupaten Demak, yang terdiri dari : Nelayan (Pengolah, Juragan, Pandega dan Pedagang), Tokoh Masyarakat, Instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM.

3.5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber informasi yaitu masyarakat nelayan, tokoh masyarakat dan perkumpulan yang mewadahnya. Data primer diperoleh melalui aplikasi instrumen penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa berbagai data dan informasi berupa dokumen diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda Kabupaten yang berupa data statistik, laporan, maupun hasil publikasi.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

a. Panduan Wawancara

Panduan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini akan disusun sebagai pedoman melakukan wawancara kepada sampel yang akan mencakup semua aspek yang akan diteliti.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan terhadap masyarakat nelayan dan pengurus perkumpulan nelayan, yang diperkaya dengan tambahan informasi dari Badan/Dinas yang mengelola kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan masyarakat nelayan.

3.6. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Provinsi Jawa Tengah

Secara geografis propinsi Jawa Tengah terletak pada koordinat 50 30' LS – 80 30' LS dan 1080 30' BT – 1110 30' BT, dengan luas wilayah sebesar 32.284,268 km² yang menempati sekitar 23,97 % luas wilayah pulau Jawa. Pantai utara Jawa Tengah yang menjadi lokasi kajian ini merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada bagian utara.

Secara administratif wilayah pantai utara Jawa Tengah ini terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota yang terbesar mulai dari ujung timur (Kabupaten Rembang) yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Kota/kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes.

Sub sektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan darat terdiri dari usaha budidaya (tambak, sawah, kolam, karamba) dan perairan umum (waduk, sungai, telaga dan rawa). Produksi yang dihasilkan dari kegiatan perikanan tersebut pada tahun 2005 di Jawa Tengah mencapai 298 ribu ton dengan nilai 1,87 triliun rupiah. Di bandingkan

dengan tahun sebelumnya, produksi dan nilai produksi turun 15,35 persen dan 2,89 persen. Produksi perikanan yang ada didominasi oleh perikanan laut sebesar 194,18 ribu ton (sekitar 65,26 persen dari total produksi perikanan) dengan nilai sebesar 782 milyar rupiah (Jawa Tengah dalam Angka, 2008). Potensi perikanan laut yang tersebar di perairan Jawa Tengah sekitar 1.873.530 ton/tahun meliputi Laut Jawa sekitar 796.640 ton/tahun dan Samudera Indonesia sekitar 1.076.890 ton/tahun.

Meskipun potensi Laut Jawa lebih kecil dibandingkan dengan Samudera Indonesia, akan tetapi kegiatan penangkapan ikan di lebih intensif. Kondisi tersebut disebabkan pantai utara Jawa Tengah yang landai dan perairan yang relatif tenang menjadikan pantai utara Jawa Tengah sebagai daerah yang memiliki cukup banyak sentra nelayan dan penangkapan ikan terutama dengan skala kecil dan menengah. Akan tetapi, kondisi perikanan tangkap Laut Jawa saat ini sudah sangat padat dengan peralatan tangkap dan cenderung sudah *over fishing* (www.brkp.dkp.go.id).

Tabel 3.1
Jumlah Kapal Berdasarkan Kabupaten/Kota
Di Wilayah Pelabuhan Pantai Utara Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Jumlah TPI / PPI / PPP / PPN / PPS	Jumlah Total Kapal	Kapal Terbanyak	
				TPI / PPI / PPP / PPN / PPS	Jumlah Kapal
1	Kab. Brebes	8	1880	TPI Krakahan	563
2	Kota Tegal	3	955	PPP Tegalsari	464
3	Kab. Tegal	2	357	PPI Larangan	281
4	Kab Pemalang	5	1270	PPP Tanjungsari	529
5	Kota Pekalongan	1	796	PPN Pekalongan	796
6	Kab. Pekalongan	2	472	PPI Jamban	341
7	Kab. Batang	4	688	PPP Klidang Lor	250
8	Kab. Kendal	4	1022	PPI Bandengan	287
9	Kota Semarang	1	495	PPP Tambaklorok	495
10	Kab Demak	2	1600	PPP Morodemak	754
11	Kab Jepara	10	1913	PPP Jobokutho	460
12	Kab Pati	7	1918	PPI Banyutowo	648
13	Kab Rembang	10	3323	PPP Tasikagung	927
	Pantura Jateng	59	16689		7114

Sumber : Diskanlut Prov. Jateng, 2009

Kawasan pantai utara Jawa Tengah yang melintasi 13 kabupaten/Kota memiliki 59 pelabuhan sebagai tempat pendaratan hasil perikanan tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Pekalongan dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Kabupaten Pati merupakan pelabuhan perikanan di kawasan Pantura Jawa Tengah yang memiliki kapal sampai dengan ukuran di atas 200 GT (Gross Ton). Sedangkan di Kabupaten Tegal, Kendal, Demak dan Kota Semarang memiliki lebih banyak jenis kapal dengan motor tempel dibandingkan dengan yang lainnya.

Kawasan pelabuhan perikanan di wilayah pantura Jawa Tengah yang memiliki jumlah kapal nelayan terbesar dengan mesin tempel adalah PPP Morodemak yang berada di Kabupaten Demak. Kawasan PPP Morodemak memiliki armada tangkap sebanyak 754 kapal dengan perincian 720 kapal

dengan motor tempel dan 34 kapal dengan ukuran 10 – 20 GT (Diskanlut Provinsi Jateng).

2. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian utara dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah di samping itu dari sisi perhubungan darat berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa.

Kabupaten Demak terletak di antara 6043' 26" – 70 09' 43" LS, dan 1100 48' 47" BT. Dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobongan
- Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang
- Sebelah barat : Kota Semarang

Luas Wilayah Kabupaten Demak adalah 88.743 ha, sedang luas laut 252,34 ha. Topografi, Luas kemiringan lahan : meliputi datar : 0 – 2%, seluas : 88.765 ha, bergelombang (2 – 15%) 834 ha, curam (15 – 40%) seluas : 408 ha, serta sangat curam (> 40%) seluas :136 ha.

Dilihat dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi), wilayah Demak terletak dari 0 m sampai dengan 100 m dari permukaan laut. Sedang dilihat dari tekstur tanahnya, wilayah Kabupaten Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha.

Secara administrasi, luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha, terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 48.947 ha, dan selebihnya adalah lahan kering.

Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 40,40% dan tadah hujan (33,22%) dan setengah teknis 12,85%. Sedang untuk lahan kering 35,395 digunakan untuk tegal kebun, 29,56% digunakan untuk bangunan dan halaman, serta 18,90 digunakan untuk tambak.

Sebagaimana musim di Indonesia pada umumnya di Kabupaten Demak hanya dikenal dua musin yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan bulan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan.

Kabupaten Demak terbagi dalam 14 Kecamatan 243 desa dan 6 kelurahan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2008 sebanyak 8.809 orang, dengan perincian golongan I sebanyak : 237 orang, golongan II sebanyak : 1.877 orang, golongan III sebanyak : 3.740 orang dan golongan IV sebanyak : 2.955 orang.

3. Kecamatan Bonang

Kecamatan Bonang memiliki luas 8.324 ha dan terletak berbatasan dengan Laut Jawa. Dengan luas 8.324 ha luas Kecamatan Bonang menempati urutan kedua Kecamatan terluas di Kabupaten Demak. Jumlah penduduk sebanyak 101.652 jiwa yang terdiri dari 50.533 jiwa laki-laki dan 51.119 jiwa perempuan. Kecamatan Bonang menempati urutan ke dua dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Demak.

Gambar 3.1
Peta Kecamatan Bonang



Sumber Peta: www.demakkab.go.id

Kecamatan Bonang terletak di pesisir pantai laut Jawa memiliki pelelangan tempat ikan yang masih aktif yaitu TPI Morodemak. Keberadaan TPI menjadikan Kecamatan Bonang sebagai penghasil ikan laut basah terbesar di Kabupaten Demak selain dari pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Wedung.. Selain itu, Kecamatan Bonang juga banyak dipelihara ikan darat seperti tawes, mujair, nila, karper, lele, nener, dan benur. Daerah sentra lele terdapat di desa Wonosari.

Sebagai daerah penghasil ikan, Kecamatan Bonang memiliki jumlah penduduk bermata pencaharian sebanyak 29,44 persen. Jumlah nelayan terbanyak terdapat di Desa Purworejo, Margolinduk dan Morodemak yang berada di kawasan PPP Morodemak. Sedangkan desa Betahwalang yang juga memiliki banyak nelayan tetapi dalam keseharian operasionalnya lebih kearah kawasan PPI Wedung di Kecamatan Wedung.

Sektor pertanian di Kecamatan Bonang juga masih berkembang dengan luas tanah sawah 5.070 ha dan 3.254 ha tanah kering. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik tahun 2008 jumlah produksi bersih tanaman padi mencapai 57.081 ton. Selain tanaman padi juga terdapat tanaman jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai.

Selain itu, di Kecamatan Bonang juga banyak dipelihara hewan ternak, antara lain sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras, ayam kampung, itik, angsa, kalkun, puyuh, dan domba. Sedangkan beberapa produk yang dihasilkan dari industri antara lain: es batu, terasi, pengeringan / presto / pengasapan ikan, roti, pakaian / konveksi.

4. Kawasan Morodemak

Kawasan nelayan Morodemak merupakan wilayah dari Pelabuhan Pendaratan Pantai (PPP) Morodemak yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Di kawasan Morodemak terdapat fasilitas pelabuhan yang didukung dengan keberadaan tempat pelelangan ikan (TPI) dan terdapat stasiun pengisian bahan bakar minyak nelayan (SPBN) meskipun keadaanya sekarang tidak dapat berfungsi karena ketiadaan pasokan akibat jembatan yang masih rusak.

PPP Morodemak secara administrasi terletak di desa Purworejo, akan tetapi masyarakat umum lebih mengenal sebagai kawasan nelayan Morodemak. Kawasan nelayan Morodemak terdiri dari sebagian besar para nelayan yang berada di beberapa desa yaitu: Desa Purworejo, Desa Margolinduk dan Desa Morodemak. Nelayan dari ketiga desa tersebut merupakan sebagian besar nelayan yang melakukan kegiatan harian di kawasan PPP Morodemak. Selain itu, kegiatan operasional di kawasan Morodemak juga didukung oleh sebagian kecil nelayan dari beberapa desa sekitar.

Seperti daerah pesisir pada umumnya, kondisi kawasan Morodemak masih relatif tertinggal pembangunan sumber daya manusianya. Kondisi tersebut tampak dari tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di kawasan tersebut. Berdasarkan Tabel 3.3, pendidikan penduduk di kawasan Morodemak masih relatif sangat rendah. Lebih dari 86 persen penduduk hanya mendapatkan pendidikan setingkat SD dan bahkan masih ada yang tidak tamat pendidikan sekolah dasar SD. Sedangkan penduduk yang mendapat pendidikan tinggi masih kurang dari 1 persen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden

4.1.1. Umur Responden

Umur nelayan responden nelayan di wilayah Morodemak bervariasi dari yang masih muda sampai yang sudah cukup umur yang secara umum berkisar antara 20 sampai dengan 60 tahun. Berdasarkan Tabel 4.1. umur terbanyak dari responden nelayan adalah 31 sampai dengan 40 tahun yang mencapai 54 persen dari total jumlah responden.

Tabel 4.1
Profil Umur Responden

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	21 – 30 Tahun	4	8 %
2	31 – 40 Tahun	27	54 %
3	41 – 50 Tahun	16	32 %
4	51 – 60 Tahun	3	6 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2010

4.1.2. Pendidikan Responden

Kualitas sumber daya manusia masyarakat pesisir dalam usaha penangkapan ikan umumnya masih rendah. Kondisi tersebut ditunjukkan dari rendahnya tingkat pendidikan dari nelayan. Nelayan daerah Morodemak rata-rata hanya memiliki pendidikan setingkat SD atau ada sebagian yang sekolah SMP dan bahkan masih banyak yang tidak/belum tamat sekolah.

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Tamat SD	2	4 %
2	SD	42	84 %
3	SMP	6	12 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.2, tingkat pendidikan nelayan di daerah penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terbanyak hanya lulusan SD yang jumlahnya mencapai 84 persen. Jumlah responden yang lulus SMP hanya 12 persen sedangkan yang tidak sekolah terdapat sebanyak 4 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan nelayan masih belum memerlukan kekuatan akal tetapi masih mengandalkan kekuatan otot saja.

4.1.3. Profil Kepemilikan Kapal

Kapal sebagai sarana alat tangkap merupakan peralatan utama yang digunakan nelayan dalam mencari ikan. Tersedianya kapal dan peralatannya akan mempermudah nelayan untuk mencari hasil tangkapan di laut.

Tabel 4.3
Status Kepemilikan Kapal

No	Status Kepemilikan	Jumlah	Persentase
1	Pemilik	35	70 %
2	Buruh	15	30 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.3, responden yang menerima bantuan merupakan pemilik kapal yang sebagian besar merupakan pemilik kapal kecil dengan tenaga

2 – 3 orang nelayan per kapal yang jumlahnya mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen lainnya merupakan tenaga buruh yang mengoperasikan kapal yang lebih besar.

4.1.4. Profil Keluarga Nelayan

Keluarga nelayan masih banyak yang memiliki keluarga besar dengan anggota keluarga lebih dari 4 orang. Beban yang ditanggung oleh kepala keluarga nelayan akan semakin besar dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga.

Tabel 4.4
Jumlah Keluarga Responden

No	Anggota Keluarga	Jumlah	Persentase
1	3 - 4 Orang	16	32 %
2	5 - 6 Orang	24	48 %
3	7 – 8 Orang	7	14 %
4	≥ 9 Orang	3	6 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.4, jumlah anggota keluarga nelayan ada yang mencapai 9 orang lebih dalam satu keluarga. Rumah tangga nelayan dengan anggota 5 - 6 orang mendominasi sebanyak 48 persen. Sedangkan keluarga kecil dengan anggota keluarga kurang dari 4 orang jumlahnya mencapai 32 persen.

4.1.5. Kegiatan di Laut

Pekerjaan penangkapan ikan oleh nelayan Morodemak sangat dipengaruhi oleh jenis kapal yang digunakan. Ukuran kapal dan fasilitas yang dimiliki akan

turut berperan dalam model operasional penangkapan ikan. Semakin kecil kapal akan semakin membatasi ruang gerak nelayan dalam kegiatan operasional di laut.

Nelayan di daerah Morodemak masih menggunakan kapal kayu untuk mendukung kegiatan operasional penangkapan ikan. Penggunaan kapal kayu tradisional tersebut yang menyebabkan sebagian besar nelayan masih melakukan *one day fishing* dengan kegiatan di laut sekitar 8 – 12 jam sehari. Biasanya nelayan berangkat pada sore hari dan pulang pada malam hari atau berangkat pada dini hari dan pulang pada siang hari. Sedangkan hasil tangkapan nelayan tergantung musim dan juga alat tangkap yang digunakan.

Dalam kegiatan operasional penangkapan ikan, bahan bakar minyak (BBM) mempunyai persentase yang tinggi dalam biaya operasional kegiatan penangkapan. Selain luas cakupan daerah operasional, ukuran kapal juga berpengaruh terhadap jumlah penggunaan BBM. Sebagai ilustrasi, kapal kecil yang mampu memuat 2 sampai 3 nelayan membutuhkan 5 – 10 liter BBM dalam sekali melaut. Sedangkan kapal ukuran besar dengan kapasitas 10 – 20 awak kapal membutuhkan 50 – 100 liter BBM dalam sekali melaut.

Tabel 4.5
Jenis Kapal Responden

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah	Persentase
1	Kecil	39	78 %
2	Besar	11	22 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.5, sebanyak 78 persen kapal yang digunakan untuk melaut hanyalah kapal kecil dengan awak kapal sebanyak 2 -3 orang. Sedangkan

kapal besar dengan awak kapal 10 – 20 orang hanya sekitar 22 persen. Semakin besar ukuran kapal maka kebutuhan biaya operasional akan semakin tinggi.

Biaya operasional kegiatan penangkapan ikan menjadi salah satu komponen yang diperhitungkan dalam sistem bagi hasil tangkapan. Jumlah hasil tangkapan nelayan akan dibagi sesuai dengan peran dan status yang disandang oleh nelayan dalam satu perahu. Berdasarkan kesepakatan bersama maka model bagi hasil nelayan tangkap adalah sebesar 50 persen untuk pemilik kapal. Sedangkan 50 persen sisanya dibagi menjadi dua yaitu separuh untuk biaya operasional dan sisanya untuk awak kapal.

4.1.6. Kegiatan di Darat

Aktifitas keseharian nelayan setelah menangkap ikan banyak dilakukan di wilayah daratan. Pekerjaan rutin untuk mendukung kegiatan melaut merupakan kegiatan harian yang tidak terlewatkan oleh semua nelayan. Selain itu, terdapat beberapa nelayan yang menggunakan waktu di darat untuk melakukan kegiatan lain yang produktif untuk menghasilkan pendapatan di luar kegiatan utama sebagai nelayan.

Tabel 4.6
Kegiatan Responden di Darat

No	Jenis Alat Tangkap	Jumlah	Persentase
1	Tidak Punya	42	84 %
2	Buruh	3	6 %
3	Tani	5	10 %
4	Tambak	1	2 %
	Jumlah	50	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2010

Berdasarkan Tabel 4.6, sebanyak 84 persen atau sebagian besar nelayan tidak memiliki pekerjaan lain di luar kegiatan mencari ikan di laut. Kegiatan yang diisi dengan istirahat di rumah, memperbaiki jaring, peralatan pendukung dan juga melakukan upaya perawatan kapal merupakan kegiatan sehari-hari yang sebagian besar dilakukan oleh nelayan. Sedangkan kegiatan produktif lainnya untuk mencari tambahan penghasilan dilakukan oleh sebagian kecil nelayan melalui kegiatan tambak, buruh di sektor lain maupun kegiatan bertani. Ketiadaan kegiatan produktif di luar penangkapan ikan akan semakin memperbesar resiko ketiadaan pendapatan ketika menghadapi musim “paceklik” akibat tidak bisa melaut.

4.2. Bantuan bagi Masyarakat Nelayan

Kondisi kehidupan masyarakat pesisir masih menunjukkan adanya keterbatasan dan ketidakberdayaan dengan indikasi masih tingginya kemiskinan dan rendahnya tingkat sumber daya manusianya. Sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan, daerah pesisir memerlukan sentuhan khusus dalam rangka meningkatkan taraf hidup dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan masyarakatnya.

Upaya mengurangi jumlah kemiskinan di wilayah pesisir perlu dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan oleh semua *stakeholders* terkait. Pemerintah sebagai salah satu pihak terkait dalam pengembangan kawasan pesisir diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap pembangunan wilayah dan masyarakat pesisir khususnya nelayan. Untuk mendukung pembangunan kawasan pesisir maka pemerintah melakukannya melalui

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut dapat berupa pemberian bantuan, perlindungan keamanan, penegakan aturan serta adanya bimbingan langsung secara teknis yang berkelanjutan.

Pemberian bantuan sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat nelayan diharapkan mampu memberikan efek yang langsung dirasakan masyarakat nelayan. Bantuan yang diberikan dapat diberikan secara langsung kepada masing-masing masyarakat yang membutuhkan terhadap perorangan maupun kelompok-kelompok kecil. Sedangkan bantuan tidak langsung diberikan dalam pembangunan sarana prasarana umum yang manfaatnya juga akan dirasakan secara bersama-sama secara lebih luas.

Tabel 4.7
Bantuan Bagi Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Demak
Periode Tahun 2003 - 2010

No	Jenis Bantuan	Frekuensi Pemberian	Keterangan
1	Kapal	1	1. Sumber dana Dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
2	Mesin	1	
3	Alat Tangkap	3	2. Diberikan langsung kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok
4	Alat Pendukung	6	
5	Pangan	1	
6	Lain-lain	2	
	Jumlah	14	

Sumber: Diskanlut Kab. Demak, 2010

Bantuan bagi masyarakat nelayan di kawasan pesisir diberikan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penyaluran langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 4.7, bantuan dari pemerintah kepada masyarakat nelayan paling banyak dalam bentuk peralatan pendukung untuk menangkap ikan seperti: lampu, *cool*

box, alat keselamatan, alat komunikasi dan lain-lain. Alat tangkap juga diberikan dalam bentuk jaring, alat penangkap rajungan dan alat tangkap lainnya. Selain itu, untuk membantu di saat nelayan tidak melaut diberikan bantuan bahan makan untuk masyarakat nelayan di wilayah pesisir.

Bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dimaksudkan agar memberikan manfaat positif bagi masyarakat penerima langsung dan diharapkan akan memberikan *multiplier efek* bagi masyarakat di sekitarnya. Bantuan yang diberikan biasanya jumlahnya relatif sedikit dan terbatas penerimanya. Kondisi tersebut dimaksudkan agar dengan rangsangan yang terbatas tetapi tepat sasaran diharapkan akan mampu berkembang dengan mekanisme perkembangan alami di masyarakat.

Pemberian bantuan pemerintah perlu disusun dengan tepat agar tidak menjadikan masyarakat hanya sebagai penerima yang sifatnya pasif dalam pengembangan program tersebut. Sesungguhnya masyarakat perlu dilibatkan dengan kesadaran penuh bahwa bantuan yang diberikan tidak diperoleh dengan cuma-cuma alias gratis. Akan tetapi perlu adanya kesadaran bahwa bantuan tersebut perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan agar dapat dikembalikan untuk membantu masyarakat yang lain yang juga membutuhkan. Program bantuan dengan sistem pengembalian bergulir di antara anggota masyarakat diharapkan akan mempercepat pembangunan di kawasan yang tertinggal.

4.3. Efektifitas dan Kesesuaian Bantuan

Pemberian bantuan untuk masyarakat nelayan sudah dilakukan pemerintah setiap tahun dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah digunakan sebagai sebagai stimulus bagi nelayan sehingga umumnya hanya diberikan kepada sebagian kecil nelayan saja.

Mengingat pemberian bantuan hanya digunakan sebagai stimulus, maka metode pemberian bantuan disesuaikan dengan jenis bantuan dan tujuan yang akan dicapai. Masyarakat penerima bantuan dapat ditentukan langsung dari atas maupun dipilih berdasarkan usulan dari kelompok masyarakat nelayan. Berbagai persyaratan telah ditentukan kriterianya sebelum menetapkan pihak mana saja yang dianggap layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Masyarakat melalui perwakilannya diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan usulan terhadap kebutuhan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Akan tetapi, kondisi di lapangan selama ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa belum dilibatkan secara aktif dalam penggalian usulan dan pemetaan terhadap berbagai kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan. Oleh karena itu, masyarakat masih merasa sebagai obyek penerima apa saja bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga kebutuhan yang sebenarnya mendesak belum tentu segera mendapatkan bantuan. Sebagai contoh di wilayah Morodemak yang sebenarnya telah memiliki stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) tetapi akibat rusaknya jembatan sebagai akses masuk ke pelabuhan menyebabkan mangkraknya SPBN yang mengakibatkan tidak tersedianya BBM untuk kapal nelayan.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan secara umum dapat dibedakan menjadi bantuan yang bersifat perorangan dan bantuan yang sifatnya massal. Bantuan yang bersifat perorangan dapat berupa alat produksi yang dapat

Keterbatasan jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat menimbulkan persoalan tersendiri dalam pelaksanaan program di lapangan. Salah satu masalah yang timbul di kalangan masyarakat adalah timbulnya kecemburuan di antara masyarakat nelayan itu sendiri. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa diantara nelayan merasa memiliki tingkat kehidupan sama tetapi tidak juga mendapatkan bantuan. Selain itu, jumlah penerima bantuan yang terbatas menimbulkan kesulitan pihak yang membantu penyaluran bantuan kepada nelayan dalam menentukan siapa saja pihak-pihak yang akan menerima bantuan.

Kesalahan dalam penetapan pihak penerima dalam penyaluran bantuan akan berpotensi menimbulkan gesekan dan kecemburuan antar masyarakat maupun dengan pihak yang membantu penyaluran bantuan. Untuk mengurangi potensi permasalahan maka diperlukan koordinasi antara berbagai pihak yang selama ini paham terhadap aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat nelayan setempat. Berbagai pihak yang berperan dalam kehidupan lokal seperti rukun tetangga (RT), kelompok nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pihak desa sangat diperlukan untuk sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan program bantuan bagi masyarakat nelayan agar program dan bantuan yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Dampak bantuan bagi masyarakat nelayan dapat dirasakan langsung oleh penerima maupun secara tidak langsung terhadap masyarakat nelayan secara umum. Dalam sisi mikro perikanan, pemberian bantuan yang berupa alat tangkap akan memberikan dampak langsung terhadap hasil tangkapan nelayan. Akan tetapi, dari sisi makro perikanan pemberian bantuan alat tangkap akan

menjadi kurang sesuai karena dengan adanya tambahan jumlah alat tangkap nelayan akan dapat menyebabkan peningkatan kepadatan jumlah nelayan. Di sisi lain, penambahan alat tangkap belum diikuti kemampuan jangkauan kapal untuk penangkapan ikan di perairan yang lebih luas. Kondisi tersebut menyebabkan semakin padatnya jumlah kapal di kawasan pesisir laut yang menjadi salah satu penyebab berkurangnya hasil tangkapan nelayan dengan kapal kecil.

Pemberian bantuan alat tangkap dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan penangkapan ikan membutuhkan dukungan *blue print* yang komprehensif dalam pembangunan kawasan nelayan jangka panjang untuk meminimalisir munculnya permasalahan baru. Pemberian bantuan secara parsial diharapkan akan menyelesaikan permasalahan jangka pendek dan diperlukan dukungan konsep pembangunan jangka panjang untuk membantu mempermudah penyelesaian permasalahan yang mungkin muncul di masa mendatang.

Sebagai salah satu contoh, munculnya gagasan penggantian atau konversi kapal nelayan dari beberapa kapal kecil diganti menjadi sebuah kapal besar memerlukan kajian yang mendalam dari segi sosial budaya selain dari sisi ekonomis. Perubahan yang secara konsep sederhana yaitu dengan mengumpulkan awak kapal kecil menjadi sebuah kelompok yang besar dengan satu kapal memiliki dampak yang sangat kompleks.

Salah satu dampak yang akan muncul dalam konversi kapal adalah penggabungan awak kapal yang memerlukan waktu penyesuaian atau adaptasi yang tidak cepat. Penyesuaian tersebut tidak hanya bersifat personal tetapi juga perubahan metode berlayar, peralatan dan alat pendukung lainnya. Perubahan

jenis dan tipe kapal akan merubah hampir seluruh model dan metode penangkapan ikan. Kondisi tersebut memerlukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas nelayan. Dengan tingkat pendidikan nelayan yang relatif rendah maka perubahan tersebut belum tentu bisa berjalan dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu, perubahan waktu berlayar dari yang selama ini setiap hari pulang juga perlu dikaji dampaknya dan pengaruhnya.

Permasalahan bantuan pemerintah yang sangat penting akan tetapi tidak terwujud dalam bentuk benda adalah keamanan laut. Keamanan laut diperlukan untuk mengurangi kemungkinan gesekan antar nelayan dari daerah berbeda dan juga mencegah kemungkinan pencurian hasil laut oleh nelayan asing. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam masalah keamanan laut adalah keterbatasan pengawasan pemerintah dalam mengontrol penggunaan alat tangkap yang dilarang sehingga menyebabkan nelayan terutama yang menggunakan kapal kecil untuk bersaing dalam mendapatkan hasil tangkapan.

4.5. Pola Pembinaan Setelah Pemberian Bantuan

Permasalahan penting yang perlu diselesaikan dalam pemberian bantuan kepada nelayan adalah tahapan sesudah program pemberian bantuan selesai dilaksanakan. Dalam tahap ini diperlukan suatu evaluasi program yang komprehensif dan penyusunan rencana keberlanjutan program. Akan tetapi, pada kenyataannya berbagai permasalahan muncul setelah program yang ada dinyatakan selesai.

Keterbatasan jumlah bantuan yang diberikan pemerintah menyebabkan penerima bantuan juga terbatas. Bantuan akan diberikan kepada masyarakat

yang memang memerlukan atau diberikan kepada masyarakat yang berpotensi untuk berkembang sehingga mampu mengembangkan usahanya. Masyarakat yang mampu mengembangkan usahanya diberikan bantuan yang sifatnya bergulir agar dengan keberhasilan usahanya dapat mengembalikan bantuan untuk diberikan kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Meskipun pemberian bantuan nelayan dimaksudkan dengan metode bergulir agar dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan lain yang membutuhkan, akan tetapi pada kenyataan di lapangan sangat sulit untuk dilaksanakan. Salah satu kendala untuk melaksanakan hal tersebut karena ketiadaan pembinaan yang rutin dan berkesinambungan.

Program pemberian bantuan kepada nelayan masih banyak dipahami oleh penyalur maupun penerima bantuan sebagai kegiatan rutin tahunan. Pemahaman tersebut dan keterbatasan anggaran yang tersedia yang menyebabkan pemerintah daerah sebagai salah satu pihak penyalur bantuan belum dapat melaksanakan pola pembinaan yang rutin dan berkesinambungan. Upaya tindak lanjut dari pihak yang terkait di luar pemerintah juga belum terjadi secara komprehensif.

Tanpa adanya pembinaan secara rutin dan berkesinambungan dari pemerintah dan pihak terkait maka dampak yang ditimbulkan dari program pemberian bantuan masih bersifat parsial. Bantuan yang diberikan hanya berpengaruh terhadap penerima dan belum mampu menimbulkan *multiplier effect* yang lebih luas. Pembinaan secara rutin dan berkesinambungan oleh pihak terkait seperti pemerintah daerah melalui petugas penyuluh lapangan diharapkan akan semakin mempercepat pemberdayaan dan membuka kesadaran arti penting bantuan terhadap kehidupan masyarakat nelayan.

Kegiatan pendampingan untuk tindak lanjut sesungguhnya bukan hanya tugas pemerintah saja. Pemerintah seharusnya dapat menggandeng dan menggerakkan *stake holders* yang lain agar berperan aktif dalam pembinaan dan pemberdayaan nelayan. Upaya menggandeng pihak terkait dalam pembinaan nelayan akan mempermudah pemberdayaan nelayan. Selain itu, permasalahan klasik seperti permasalahan ketiadaan anggaran dapat diminimalisir.

Selain pembinaan dalam perikanan tangkap, perlu ditingkatkan pengembangan diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha masyarakat nelayan dapat dilakukan melalui usaha budidaya perikanan, usaha peningkatan nilai tambah hasil perikanan maupun peningkatan usaha lain non perikanan. Diversifikasi usaha diharapkan akan mengurangi dampak kurang menguntungkan di masa paceklik bagi nelayan dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kesesuaian bantuan bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Demak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan kawasan Morodemak sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan terhadap peralatan tangkap ikan. Dalam jangka pendek, pemberian bantuan peralatan tangkap telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil tangkapan nelayan yang menerima bantuan peralatan tersebut.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian bantuan adalah bahwa bantuan yang diberikan jumlahnya relatif terbatas dan hanya dapat diberikan kepada sebagian kecil nelayan. Manfaat terbesar dari pemberian bantuan hanya dapat dinikmati oleh nelayan penerima bantuan dan seringkali menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya kecemburuan sosial dari nelayan lain yang tidak menerima.
3. Program pemberian bantuan bagi masyarakat nelayan masih sering dipahami sebagai kegiatan rutin tahunan sehingga pola pembinaan sebagai tindak lanjut program seringkali diabaikan dengan alasan klasik ketiadaan anggaran. Ketiadaan pola pembinaan yang berkesinambungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat nelayan bahwa bantuan yang diberikan dapat dikembangkan

agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat.

5.2. Saran

Untuk memberikan bantuan bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Demak, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bantuan yang sangat diperlukan oleh nelayan adalah kemudahan dan keterjangkauan terhadap bahan bakar minyak (BBM) karena merupakan input terbesar dalam biaya operasional nelayan. Selain itu diperlukan suatu pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi nelayan kecil dari persaingan yang tidak sehat.
- b. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan di wilayah pesisir di masa mendatang tidak hanya diarahkan ke sektor perikanan tangkap tetapi juga diperlukan bantuan lainnya untuk mendukung program pengembangan diversifikasi usaha nelayan dalam rangka peningkatan tambahan sumber penghasilan masyarakat nelayan di kawasan pesisir.
- c. Pola pembinaan masyarakat nelayan perlu dilakukan secara terus menerus dan melibatkan berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemerintah dapat kembali mengaktifkan keberadaan petugas penyuluh lapangan (PPL) sebagai ujung tombak pembangunan perikanan yang bertugas melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan secara berkesinambungan kepada masyarakat nelayan di kawasan pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. 1979. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. PT. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Bengen, D. G. 1998. *Sinopsis Analisis Statistik Multivariabel/Multidimensi*. Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. IPB. Bogor.
- Biro Pusat Statistik. 1993b. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. BPS. Jakarta. 289 hal.
- Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc , Sekjen Depsos, **PENANGANAN MASALAH KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA (POVERTY REDUCTION AT NORTH SUMATERA)**
- Isbandi Rukminto Adi, 2005 , Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia
- Kompas Cetak, www.kompas.com
- Nikijuluw, V. P. H. 2000. *Kebijakan dan Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. PK-SPL IPB. Bogor.
- Rusli, S. 1982. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. LP3ES. Jakarta.
- Riffin, A. 1997. *Tinjauan Keunggulan Produk Industri Kecil*. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Soemirat, J. 1994. *Kesehatan Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Savitri, L. A., dan M. Khazali. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir*. WI-IP PKSPL IPB. Bogor.
- Siegel, S. 1986. *Statistik Non-Parametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Diterjemahkan oleh Zanzani Suyuti dan Landung Simatupang. 1994). PT. Gramedia. Jakarta.